



Membangun Kesetaraan: Kajian Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan di Sumatera Utara dengan Pendekatan Kritis

Darmansyah Pulungan, Bambang Tri Sasongko Adi, Oman Sukmana, Vina Salviana D. Soedarwo

Universitas Muhammadiyah Malang

corresponding author: darmansyah.pulungan@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis rendahnya partisipasi perempuan di Sumatera Utara melalui perspektif kritis Julia Kristeva, dengan fokus pada konsep abjeksi, semiotik, dan simbolik, serta membandingkan profil keterwakilan perempuan secara lokal, nasional, dan global. Kajian ini mengidentifikasi hambatan budaya, norma sosial, dan stigma yang menghalangi perempuan dalam mengakses posisi strategis meskipun telah ada regulasi, seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan UU Nomor 2 Tahun 2008. Dengan menggunakan metode kualitatif dan data sekunder dari BPS Sumatera Utara, laporan pemerintah daerah, dan literatur akademik, hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial dan struktur simbolik yang kuat menjadi kendala utama dalam partisipasi perempuan. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik melalui edukasi publik, perubahan pola pikir sosial, dan kebijakan yang lebih inklusif guna meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.

Kata kunci: Partisipasi Perempuan, Sumatera Utara, Budaya, Regulasi, Norma Sosial, Abjeksi

Abstract

This study analyzes the low participation of women in North Sumatra using Julia Kristeva's critical perspective, focusing on the concepts of abjection, semiotics, and symbolism, while comparing women's representation profiles at local, national, and global levels. It identifies cultural barriers, social norms, and stigma that hinder women from accessing strategic positions, despite regulations such as Presidential Instruction No. 9 of 2000 and Law No. 2 of 2008. Utilizing a qualitative approach and secondary data from the North Sumatra Statistics Agency, local government reports, and academic literature, the findings highlight that entrenched social norms and symbolic structures remain significant obstacles to women's participation. This study recommends a holistic approach involving public education, shifts in social mindsets, and more inclusive policies to enhance women's roles in development.

Key words: Women's Participation, North Sumatra, Culture, Regulation, Social Norms, Abjection

PENDAHULUAN

Partisipasi perempuan dalam pembangunan telah menjadi isu global yang terus mendapat perhatian, terutama dalam rangka mencapai target Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Indonesia, sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap SDGs, telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di berbagai sektor. Salah satu langkah strategis adalah melalui pengarusutamaan gender sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Namun, implementasi di tingkat daerah, termasuk Provinsi Sumatera Utara, masih menghadapi banyak tantangan.



Di Sumatera Utara, perempuan berkontribusi signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk dalam budaya tradisional Batak yang memiliki sistem nilai yang kuat. Namun, keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pengambilan keputusan, masih tergolong rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara hanya mencapai 15%, jauh di bawah kuota 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (BPS, 2024). Demikian pula, tingkat partisipasi perempuan dalam jabatan manajerial di tingkat regional masih sangat terbatas, dengan data rinci sering kali tidak tersedia atau kurang terdokumentasi. Keterbatasan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya regulasi, tetapi juga oleh norma-norma budaya patriarki yang masih kuat. Tradisi masyarakat Batak, misalnya, cenderung menempatkan perempuan dalam peran domestik atau sebagai "parhobas" dalam upacara adat, di mana mereka berperan mendukung, tetapi jarang memimpin. Norma ini memengaruhi persepsi masyarakat tentang perempuan sebagai pemimpin atau pembuat keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat perubahan signifikan dalam akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan di Sumatera Utara. Data BPS menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan di Kota Medan, misalnya, mencapai 74,98 tahun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (73,58 tahun pada 2021). Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan di Kota Medan juga mencapai 14,93 tahun, menunjukkan peningkatan akses pendidikan (BPS, 2024). Namun, capaian ini belum cukup untuk meningkatkan peran perempuan dalam sektor strategis, khususnya dalam ekonomi formal dan politik.

Dalam konteks teori Julia Kristeva, rendahnya partisipasi perempuan dapat dilihat sebagai bentuk abjeksi, di mana perempuan yang berusaha keluar dari peran tradisional menghadapi resistensi sosial. Norma-norma simbolik yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat menjadi penghalang utama bagi transformasi sosial yang lebih inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami hambatan ini, baik dari aspek budaya, struktural, maupun implementasi regulasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data yang dikumpulkan meliputi statistik gender dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara tahun 2021-2022, laporan pemerintah daerah, serta publikasi nasional yang relevan mengenai partisipasi perempuan. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada laporan kebijakan seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan regulasi lain yang mendukung analisis terkait. Kajian literatur dari artikel akademik, jurnal, dan penelitian sebelumnya digunakan untuk memperkaya pembahasan mengenai partisipasi perempuan, budaya Batak, serta teori Julia Kristeva. Selain itu, pandangan tokoh dan pakar yang diperoleh melalui analisis terhadap wawancara atau publikasi mereka juga menjadi salah satu sumber penting dalam penelitian ini, khususnya untuk mengidentifikasi hambatan partisipasi perempuan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena partisipasi perempuan di Sumatera Utara secara rinci. Analisis dilakukan melalui beberapa langkah, dimulai dengan pengelompokan data. Data tentang keterwakilan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial dikelompokkan berdasarkan wilayah (provinsi dan kabupaten/kota) serta sektor, sedangkan pendapat tokoh dan pakar diklasifikasikan berdasarkan tema seperti hambatan budaya, implementasi regulasi, dan stigma sosial. Penelitian ini juga memanfaatkan kerangka teori Julia Kristeva, khususnya konsep abjeksi, untuk menganalisis bagaimana perempuan mengalami eksklusi sosial dalam budaya dan struktur politik. Selain itu, teori semiotik dan simbolik digunakan untuk memahami interaksi antara norma



budaya dan regulasi formal dalam membentuk peran perempuan.

Data partisipasi perempuan di Sumatera Utara kemudian dibandingkan dengan data nasional dan global untuk memberikan konteks yang lebih luas. Efektivitas regulasi juga dievaluasi berdasarkan kesenjangan antara target kebijakan dan implementasinya di lapangan. Proses interpretasi data dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan kultural yang menjadi hambatan partisipasi perempuan. Pendekatan kritis ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara budaya patriarki, marginalisasi perempuan, dan efektivitas regulasi dalam membentuk dinamika partisipasi perempuan di Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Ringkasan data partisipasi perempuan dalam beberapa sektor pembangunan di Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1: Data statistik partisipasi perempuan dalam pembangunan Sumatera Utara.

Bidang	Indikator	Data (Sumatera Utara)	Data Nasional
Legislatif	Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi	15%	20,5%
	Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	<30%	22%
Eksekutif	Jumlah perempuan dalam jabatan kepala dinas	Data terbatas	Data terbatas
UMKM	Persentase UMKM yang dimiliki perempuan	64,5%	60-65%
Ekonomi	Pengeluaran per kapita perempuan	Rp13.973.000	Rp15.920.000

Keterwakilan perempuan dalam legislatif di Sumatera Utara masih menunjukkan kesenjangan dibandingkan dengan tingkat nasional. Persentase perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara hanya mencapai 15%, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 20,5%. Di tingkat kabupaten/kota, meskipun data di Sumatera Utara menunjukkan angka keterwakilan perempuan masih di bawah 30%, secara nasional keterwakilan ini mencapai 22%. Hal ini mencerminkan masih adanya tantangan struktural dan kultural yang menghambat perempuan untuk berpartisipasi secara optimal dalam proses pengambilan keputusan di ranah legislatif, terutama di tingkat daerah (Rahayu & Sari, 2020; Umagapi, 2020).

Dalam eksekutif, data mengenai jumlah perempuan yang menduduki jabatan kepala dinas di Sumatera Utara maupun nasional masih terbatas. Kekurangan data ini menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk mengukur sejauh mana perempuan berpartisipasi dan berperan dalam kepemimpinan di sektor eksekutif, sekaligus menyoroti pentingnya pelibatan perempuan dalam posisi strategis pemerintahan (Ismail et al., 2023; Niron & Seda, 2023).

Di sektor UMKM, kontribusi perempuan tampak signifikan. Sebanyak 64,5% UMKM di Sumatera Utara dimiliki oleh perempuan, selaras dengan tren nasional yang berada di kisaran 60-65% (Puspitasari et al., 2024). Ini mengindikasikan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian lokal dan nasional, terutama melalui usaha kecil dan menengah. Namun, tantangan yang sering dihadapi adalah akses terhadap modal, pelatihan, dan pengembangan usaha untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mereka (Hasan et al., 2023).

Dalam aspek ekonomi, pengeluaran per kapita perempuan di Sumatera Utara sebesar Rp13.973.000, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai Rp15.920.000 (BPS, 2024). Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang mungkin dipengaruhi oleh keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan formal, pendidikan, dan peluang ekonomi lainnya (Ayu, 2017; Huriani, 2021; Pertiwi et al., 2024).

1.1. Pendapat Tokoh Masyarakat dan Ahli

Penelitian ini juga menggali informasi berupa pendapat para tokoh di Pemerintahan dan ahli dari akademis. Kompilasi pendapat ini didapatkan dari sumber sekunder dari berbagai media.

Tabel 2: Rangkuman pendapat para tokoh dan ahli terkait partisipasi perempuan.

Nama	Jabatan/Profesi	Pendapat
Hasban Ritonga	Sekretaris Daerah Sumatera Utara	Menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses, partisipasi, manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang strategis lainnya (sumutprov.go.id).
Prof. Darmayanti Lubis	Wakil Ketua DPD RI	Menyatakan bahwa tanpa kehadiran perempuan sebagai penentu kebijakan, kebijakan yang dihasilkan tidak akan responsif terhadap kebutuhan perempuan (sumutprov.go.id).
Mikha Juni Adellina Mendrofa	Peneliti	Budaya patriarki menghambat partisipasi perempuan sejalan dengan konsep Kristeva tentang bagaimana norma sosial (simbolik) dapat menciptakan batasan yang kuat dan mengesampingkan elemen-elemen yang berpotensi mengubah atau mengganggu tatanan yang ada (jurnalmahasiswa.uma.ac.id).
Susi Susanti dan Adelita Lubis	Peneliti	Menyatakan bahwa rendahnya partisipasi politik perempuan di Kota Medan disebabkan oleh faktor budaya dan kurang dikenalnya perempuan-perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (ojs.uma.ac.id).
Salman Lubis dan Adelita Halking	Peneliti	Menyatakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam pemilu di Desa Bandar Khalipah disebabkan oleh kurangnya dukungan dari keluarga, kurangnya pergaulan perempuan, dan kendala dana (j-innovative.org).

Para ahli dan tokoh masyarakat terus menyoroti tantangan yang menghambat perempuan dalam berpartisipasi di berbagai sektor. Hasban Ritonga, Sekretaris Daerah Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa kesenjangan gender masih menjadi masalah serius di sektor ekonomi, politik, dan sosial. Ia menekankan bahwa perbedaan akses dan peluang antara perempuan dan laki-laki mencerminkan minimnya implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tingkat daerah. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pemahaman tentang pentingnya perspektif gender di kalangan pembuat kebijakan (Angwaomaodoko, 2024; Schneider et al., 2024).

Senada dengan itu, Prof. Darmayanti Lubis, Wakil Ketua DPD RI, menyatakan bahwa meskipun kerangka kebijakan gender telah ada, implementasinya sering terkendala oleh budaya patriarki yang kuat. Peneliti Mikha Juni Adellina Mendrofa menambahkan bahwa budaya patriarki di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara, membatasi perempuan untuk mengambil peran strategis dan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, hanya 13% perempuan yang menjadi negosiator dalam proses perdamaian global antara 1992-2018 (Caywood & Darmstadt, 2024; Schneider et al., 2024). Selain itu, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan gender sering kali tidak responsif secara menyeluruh. Misalnya, kebijakan pembangunan berbasis gender di banyak negara masih cenderung bersifat teknokratis, tanpa mempertimbangkan faktor struktural dan budaya yang memperkuat diskriminasi gender (Aprilia & Triani, 2022; Joshi et al., 2024). Hal ini terlihat pada sektor seperti pengelolaan air, di mana perempuan masih menghadapi stereotip dan marginalisasi dalam pengambilan keputusan (Prihantoro, 2018; Solanke, 2017).



Meskipun demikian, internet telah membuka ruang baru bagi perempuan untuk menyuarakan hak mereka. Dalam konteks global, media digital memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam diskusi politik dan advokasi feminisme, sekaligus mengatasi hambatan budaya lokal (He, 2024). Namun, penggunaan internet juga menghadirkan tantangan baru, seperti stigma terhadap feminisme dan penyebaran informasi yang keliru (He, 2024; Zhang, 2022).

Untuk mengatasi hambatan ini, pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan perempuan, reformasi kebijakan berbasis gender, dan advokasi untuk kesetaraan diperlukan. Program seperti gender mainstreaming yang sukses di beberapa negara, meskipun belum sempurna, dapat menjadi referensi untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif (Caywood & Darmstadt, 2024; Kuswanti, 2020). Di sisi lain, pelibatan perempuan dalam teknologi dan pengembangan kebijakan berbasis teknologi juga menjadi solusi potensial dalam menghadapi tantangan patriarki modern (Zhang, 2022).

1.2. Efektivitas Penerapan Peraturan

Terakhir, penelitian ini menganalisa efektivitas penerapan regulasi terkait pengarusutamaan gender di Provinsi Sumatera Utara. Ringkasan analisis disajikan pada paragraf-paragraf berikut.

Kajian terhadap regulasi kunci terkait keterlibatan perempuan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif di tingkat daerah maupun nasional. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, misalnya, masih menghadapi kendala dalam penerapan. Meskipun regulasi ini menjadi landasan penting untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor, implementasinya di tingkat daerah belum optimal karena minimnya rencana aksi yang spesifik dan terukur. Hal ini menyebabkan kebijakan tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan pada penguatan keterlibatan perempuan (Arafat, 2023; Masnira et al., 2022; Pemda Prov. Sumut, 2021).

Demikian pula, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam politik sering kali tidak terpenuhi. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak partai politik belum secara serius memenuhi kuota ini, baik dalam pencalonan legislatif maupun kepemimpinan partai (Abidin et al., 2023; Pemda Prov. Sumut, 2021; Priandi & Roisah, 2019; Setyoningrum & Nindita, 2024; Wahyudi, 2018).

Efektivitas penerapan kedua regulasi ini terkendala oleh hambatan budaya yang masih kuat, seperti dominasi budaya patriarki yang mengurangi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi secara setara. Selain itu, minimnya sosialisasi dan pemahaman terhadap kebijakan-kebijakan tersebut di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan turut menjadi faktor penghambat (Zarfinayenti, 2019). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan integrasi yang lebih baik antara perubahan struktur simbolik melalui regulasi dan transformasi norma sosial melalui perubahan semiotik. Upaya ini melibatkan peningkatan edukasi, kampanye kesetaraan gender, dan penguatan kapasitas institusi dalam memastikan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dapat diimplementasikan secara efektif.

2. Pembahasan

2.1. Marginalisasi dan Abjeksi dalam Partisipasi Publik

Rendahnya angka keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara (15%) dan DPRD Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 30% dapat dipahami melalui konsep abjeksi yang dikemukakan Julia Kristeva. Dalam kerangka ini, abjeksi merujuk pada penolakan terhadap sesuatu yang dianggap mengancam identitas kelompok. Perempuan yang mencoba mengambil peran strategis dalam politik sering kali dihadapkan pada resistensi sosial yang mencerminkan abjeksi ini. Mereka dianggap tidak sesuai dengan norma budaya patriarki yang mengutamakan laki-laki dalam struktur pengambilan keputusan (Pournami, 2024). Pendapat Susi Susanti dan



Adelita Lubis menguatkan pandangan ini, di mana stigma negatif terhadap perempuan politikus mencerminkan resistensi terhadap identitas baru yang diperkenalkan oleh perempuan dalam ranah publik. Tekanan budaya tersebut menciptakan lingkungan yang sulit bagi perempuan untuk mengubah struktur sosial yang ada, karena partisipasi mereka sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas identitas sosial tradisional yang mapan. Interpretasi ini menunjukkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan bukan hanya disebabkan oleh kurangnya kebijakan, tetapi juga oleh dinamika sosial dan kultural yang mendalam.

2.2. Pengaruh Simbolik dan Semiotik dalam Akses Ekonomi dan Pendidikan

Akses pendidikan yang relatif baik bagi perempuan di Sumatera Utara, seperti tercermin dalam Harapan Lama Sekolah sebesar 14,93 tahun, dapat dilihat sebagai pencapaian dalam aspek simbolik, yakni struktur formal dan aturan sosial yang mendukung pendidikan bagi perempuan. Namun, hambatan tetap terlihat dalam aspek ekonomi, di mana pengeluaran per kapita perempuan hanya mencapai Rp13.973.000, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan konsep simbolik dan semiotik Kristeva, pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan menunjukkan adanya perubahan dalam struktur simbolik yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang secara formal (Faried, 2020; Kale et al., 2020). Namun, ketimpangan ekonomi menandakan masih kuatnya norma-norma sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat di ranah semiotik, yang terkait dengan emosi, dorongan budaya, dan praktik keseharian.

Budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Sumatera Utara juga menjadi penghalang yang signifikan. Seperti yang diungkapkan oleh Mikha Juni Adellina Mendrofa dan rekan-rekannya, norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat sering kali menciptakan batasan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif di sektor ekonomi dan politik. Dalam pandangan Kristeva, norma-norma ini membentuk struktur simbolik yang kokoh, menciptakan resistensi terhadap perubahan yang diusulkan oleh perempuan yang mencoba melampaui peran tradisional mereka (Abidin et al., 2023; Huriani, 2021). Dengan demikian, meskipun pendidikan memberikan fondasi simbolik yang penting, perubahan dalam norma sosial dan budaya semiotik sangat diperlukan untuk menciptakan kesetaraan substansial bagi perempuan di Sumatera Utara.

2.3. Peran Perempuan sebagai “Parhobas” dalam Budaya Batak

Peran perempuan dalam masyarakat Batak sering kali diatur oleh norma tradisional yang menempatkan mereka sebagai parhobas, atau pelayan dalam upacara adat. Dalam pandangan Julia Kristeva, semiotik berhubungan dengan dorongan emosional dan identitas prabahasa yang sering kali diabaikan dalam struktur sosial simbolik. Norma-norma ini mempertahankan hierarki sosial patriarkal, di mana perempuan ditempatkan pada posisi subordinat, meskipun peran mereka sangat penting dalam menjaga keberlangsungan adat. Norma ini menciptakan mekanisme simbolik yang kokoh untuk menjaga identitas budaya, tetapi sering kali mengabaikan potensi ekspresi dan kreativitas perempuan (Sibarani & Gulo, 2020; Simatupang, 2024).

Regulasi seperti Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 dan UU No. 2 Tahun 2008 telah berupaya memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan di ranah publik. Namun, implementasi regulasi ini sering kali terhambat oleh resistensi budaya dan norma sosial yang sudah mengakar (Pemda Prov. Sumut, 2021). Kristeva menekankan bahwa perubahan simbolik seperti aturan formal tidak akan efektif tanpa disertai perubahan semiotik, yaitu sikap emosional dan nilai-nilai budaya (Faried, 2020; Kale et al., 2020). Hal ini terlihat di Sumatera Utara, di mana upaya pengarusutamaan gender masih bertabrakan dengan tradisi.

Untuk menciptakan pemberdayaan perempuan yang lebih holistik, perlu adanya keselarasan antara perubahan simbolik dan semiotik. Perubahan regulasi harus diikuti dengan transformasi sikap masyarakat terhadap peran perempuan. Tanpa perubahan dalam norma budaya yang mendukung, regulasi hanya akan menjadi simbol tanpa substansi nyata. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan struktural dan kultural diperlukan untuk menciptakan



ruang yang lebih inklusif bagi perempuan dalam budaya Batak dan masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan.

3. Rekomendasi

Untuk meningkatkan peran perempuan di ranah publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Utara, diperlukan beberapa rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan secara holistik. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat pengarusutamaan gender melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintahan dalam memahami dan menerapkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Pelatihan dan sosialisasi harus dilakukan secara intensif, dengan fokus pada bagaimana memasukkan perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan anggaran pembangunan.

Kedua, pendekatan budaya harus menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan perempuan. Mengingat kuatnya tradisi patriarki dalam budaya Batak, program pemberdayaan perlu melibatkan tokoh adat dan agama untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan peran perempuan. Dengan melibatkan komunitas lokal, termasuk perempuan itu sendiri, perubahan dalam norma budaya dapat lebih diterima secara bertahap, sehingga mendukung implementasi regulasi yang telah ada.

Ketiga, akses perempuan terhadap pendidikan dan ekonomi harus terus diperluas. Selain mendorong pendidikan formal, program keterampilan dan pelatihan kewirausahaan perlu difokuskan pada perempuan, terutama di daerah pedesaan, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Peningkatan akses terhadap modal usaha, jaringan pasar, dan teknologi juga harus menjadi prioritas untuk mendukung perempuan yang terlibat dalam sektor UMKM.

Terakhir, kampanye publik yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi stigma sosial terhadap perempuan yang mengambil peran strategis dalam politik dan pembangunan. Kampanye ini dapat melibatkan media massa dan media sosial untuk menyoroti kontribusi perempuan yang berhasil di berbagai sektor. Dengan mengedepankan figur-figur perempuan inspiratif, diharapkan dapat mendorong perubahan persepsi masyarakat dan mempercepat terciptanya kesetaraan gender di Sumatera Utara.

SIMPULAN

Dengan menggunakan teori Julia Kristeva, analisis ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Sumatera Utara dibatasi oleh norma sosial yang kuat dan kurangnya perubahan dalam struktur simbolik serta semiotik masyarakat. Data-data dan pendapat para pakar memperlihatkan bahwa meskipun ada upaya melalui regulasi, resistensi budaya dan stigma sosial masih menjadi penghalang utama.

Untuk mencapai peningkatan yang signifikan, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup edukasi publik, perubahan dalam pola pikir sosial, dan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Perubahan ini tidak hanya bersifat struktural tetapi juga melibatkan transformasi dalam cara masyarakat memandang identitas dan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J. Z., Huriani, Y., & Zulaiha, E. (2023). Perempuan Berdaya: Memperkuat Peran Perempuan dalam Budaya Tradisional. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 13(2), 67–76. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v13i2.26847>
- Angwaomaodoko, E. A. (2024). Feminism and Global Governance: Investigating the Role of Women in Peace-Building, Human Rights, and Global Development. *International Journal of Global Sustainability*, 8(1), 61–71. <https://doi.org/10.5296/ijgs.v8i1.22162>



- Aprilia, V., & Triani, M. (2022). Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender, Rasio Ketergantungan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(3), 43–50.
- Arafat, A. (2023). *Kebijakan Publik (Teori dan Praktik)* (1st ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. www.penerbitlitnus.co.id
- Ayu, R. K. (2017). Perempuan Pebisnis Startup di Indonesia dalam Perspektif Cybertopia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 1(2), 116–130. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i2.167>
- BPS. (2024). *Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2022-2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0Izl=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>
- BPS. (2024). *Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun), 2022-2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDU1Izl=/angka-harapan-hidup--ahh--menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>
- Caywood, K., & Darmstadt, G. L. (2024). Gender mainstreaming at 25 years: Toward an inclusive, collaborative, and structured research agenda. *Journal of Global Health*, 14(04011), 1–14. <https://doi.org/10.7189/JOGH.14.04011>
- Faried, M. (2020). Representasi Negara dalam Naskah Drama Monolog Politik Karya Putu Fajar Arcana: Kajian Intertekstualitas Julia Kristeva. *Intertekstualitas Julia Kristeva*, 1(1), 1–11.
- Hasan, R. O., Imsa, M. A., Darmawan, R., Qonita, N. H., & Az Zahra, S. Y. (2023). Peningkatan Keterampilan Jurnalistik Masyarakat Pelaku Industri Pariwisata Di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(4), 207–220. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i4.2400>
- He, J. (2024). Research on the Development of Feminism from the Perspective of the Internet. *Advances in Social Behavior Research*, 8(1), 51–55. <https://doi.org/10.54254/2753-7102/8/2024071>
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan Fundamental Tentang Perempuan* (M. T. Rahman, Ed.; 1st ed.). Lekkas. <https://www.researchgate.net/publication/361257234>
- Ismail, A., Umar, F., & Bakhtiar. (2023). Perempuan Kepala Desa: Kajian Dediferensiasi dan Derasionalisasi Peran Perempuan Kepala Desa dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 18(1), 100–107. <https://ojs.unm.ac.id>
- Joshi, D., Nicol, A., Peveri, V., & Mitra, A. (2024). Editorial: Changing the discourse: from the rhetoric on women and water to a feminist water agenda. *Frontiers in Human Dynamics*, 6(1359613), 1–3. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2024.1359613>
- Kale, M. B., Turukmane, Wayal, D. V., & Vasanta Wayal, D. (2020). *Julia Kristeva: Feminism and Psychoanalysis*. 63–66. www.langlit.org
- Kuswanti, A. (2020). *Model Komunikasi Pemberdayaan Kemandirian Ekonomi Perempuan melalui Kelompok Pekka* [Disertasi]. Institut Pertanian Bogor.
- Masnira, A., Sukri, S., & Ariana, A. (2022). Kebijakan Partai Politik dalam Menentukan Syarat Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 1308–1315.



- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2023). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 9(2), 203–228.
- Pemda Prov. Sumut. (2021). *Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pengarusutamaan Gender*.
- Pertiwi, N., Wati, E. R. K., Nurriyalia, M., Pitriana, P., Rambe, B. L., & Umbarab, S. (2024). Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa Beruge Darat Kecamatan Talang Ubi. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3), 1–11. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.369>
- Pournami, S. R. (2024). The Concept of Abjection in the Philosophy of Julia Kristeva. *International Journal Od Multidisciplinary Educational Research*, 13(5), 36–39. <https://doi.org/ijmer.in.doi./2024/13.5.50>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
- Prihantoro, E. (2018). Stereotip Perempuan Calon Legislatif Dalam Wacana Media Massa Online Di Tahun Politik. *Jurnal Semiotika*, 12(1). <http://journal.ubm.ac.id/>
- Puspitasari, A. D., Octaviani, N. A., Setiawan, Y., & Nuraini, R. (2024). Keberlanjutan UMKM Perempuan: Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Fintech. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 25(2), 122–142. <https://doi.org/10.30596/jimb.v25i2.21287>
- Rahayu, S., & Sari, M. (2020). Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Indonesia: Evaluasi dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 5(2), 34–58.
- Schneider, S. H., Gödderz, A., Zille, H., & Sassenhagen, N. (2024). Who supports feminist development policy? Evidence from Germany. *European Journal of Politics and Gender*, 7(2), 291–295. <https://doi.org/10.1332/251510821X16877942994234>
- Setyoningrum, A. A. D., & Nindita, K. (2024). Studi Fenomenologi Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga, Wirausaha, dan Peningkatan Ekonomi Keluarga di Wilayah Pesisir Utara Semarang. *Jurnal Maritim Polimarim*, 10(1), 13–19.
- Sibarani, R., & Gulo, Y. (2020). Subordinasi Kepemimpinan Perempuan dalam Budaya Batak Toba. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, 6(1), 73–83. <https://doi.org/10.24114/antro.v6i1.16636>
- Simatupang, A. F. (2024). Konstruksi Sosial Realitas Perempuan Batak Toba sebagai Parhobas pada Komunitas Adat Batak Toba di Kota Salatiga: Pendekatan Teori Peter Berger dan Thomas Luckmann. *Jurnal Neo Societal*, 9(3), 141–152.
- Solanke, I. (2017). *Discrimination as Stigma: A Theory of Anti-discrimination Law*. Hart Publishing. www.isbs.com
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*, 25(1), 19–34.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea>
- Zarfinayenti. (2019). *Partisipasi Perempuan dalam Politik: Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan Dalam Politik di Provinsi Jambi Masa Reformasi Sampai Sekarang (Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)* [Disertasi]. UIN Sunan Kalijaga.
- Zhang, Y. (2022). An exploration of the Mulan-like Situation of Women's Welfare in the Perspective of Techno-Feminism. *Proceedings of the 2022 5th International Conference on Humanities Education and Social Sciences (ICHESS 2022)*, 1559–1563. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-89-3_179